

## BAB II

### BENTUK DIPLOMASI BILATERAL INDONESIA DAN JEPANG

Dalam melihat hubungan antara Indonesia dan Jepang, disini saya menggunakan teori *multi track diplomacy*. Mengapa saya memakai teori ini, karena selama ini antara Indonesia dan Jepang telah banyak melakukan hubungan dan kerjasama dalam berbagai bidang dan ini dilakukan tidak hanya melalui state dengan state ataupun antara government dengan government tetapi bisa melalui multi jalur. Adapun elemen-elemen dari multi track diplomasi adalah:

- Government

Bentuk diplomasi bilateral yang dilakukan oleh government to government yaitu adanya pertukaran duta besar dimana perwakilan Duta besar Indonesia berada di Jepang, dan begitu juga sebaliknya yaitu perwakilan yaitu duta besar Jepang yang berada di Indonesia. Tak hanya itu saja, banyaknya kunjungan-kunjungan yang dilakukan antara pemerintahan Indonesia dan pemerintah Jepang.

- NGO (Non Government)
- Bussinees

Dalam kerjasama bisnis, di sini dapat di contohkan kerjasama Indonesia-Jepang di bidang ekonomi dan perdagangan. Bagi Indonesia, Jepang merupakan Negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Seperti banyaknya produk-produk buatan Jepang yang terpasar di Indonesia, seperti mobil, motor, alat-alat elektronik, makanan, dll. Sedangkan Jepang mengimpor barang-barang hasil sumber daya alam seperti hortikultura, hasil tambang, minyak, dll.

- Private Citizen

Pada elemen ini dapat dicontohkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang politik. Pada kerjasama ini Jepang dan Indonesia sama-sama saling memberikan pengaruh dalam bidang politik. Jepang mempunyai kekuatan politik dimata dunia khususnya di wilayah Asia. Sebenarnya kekuatan ekonomi Jepang itulah yang menjadi kekuatan politiknya. Inilah yang membuat ketergantungan Indonesia terhadap bantuan Jepang, dimana Jepang sering memberikan bantuan ekonomi terhadap Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan politik Indonesia kurang maksimal, namun meskipun demikian Jepang masih memuji politik luar negeri yang dilakukan Indonesia terhadap Jepang karena menurut Jepang hal ini juga menguntungkan bagi Indonesia dalam sektor perdagangan. Sehingga hal ini juga dapat memperikan perkembangan, perbaikan dan kemajuan bagi Indonesia.

- Research, Training, and Education

Tidak hanya kerjasama dibidang ekonomi saja, Indonesia-Jepang juga melakukan kerjasama di bidang sosial budaya. Contohnya adanya pelatihan yang diberikan Jepang kepada Indonesia yaitu dalam 3 bidang yakni masalah kesehatan, pertanian dan transportasi. Selain itu, adanya kerjasama di bidang pendidikan dan budaya. Upaya kerjasama dibidang pendidikan ini dipicu oleh tingkat penerimaan dan pengaplikasian pendidikan yang masih rendah di Indonesia, sehingga Indonesia-Jepang melakukan pertukaran pelajar, yang mana banyak warga Indonesia yang bersekolah di sana dan begitu juga sebaliknya. Banyak juga tenaga pengajar Jepang yang berada dan mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia.

- Activism

- Religions

- Funding

Indoneis-Jepang juga melakukan kerjasama yaitu kredit uang, yang mana Jepang banyak memberikan pinjaman uang kepada Indonesia guna untuk perbaikan ekonomi Indonesia dan pembangunan infrastruktur Indonesia. Indonesia - Jepang juga melakukan kerjasama di bidang investasi. Jepang merupakan salah satu Negara yang mempunyai investasi terbesar di Indonesia, contohnya banyak didirikan perusahaan jepang di Indonesia yang mana tenaga kerjanya adalah warga Indonesia. Oleh karena itu, jepang termasuk salah satu Negara pensuplai lapangan kerja di Indonesia.

- Communications and media

Awal hubungan Indonesia-Jepang ini dimulai pada tahun 1950an dimana kedua Negara mulai membahas masalah pampasan perang sebagai bentuk ganti rugi yang diakibatkan oleh Jepang di Indonesia pada masa perang dahulu. Kemudian Indonesia membuka kantor perwakilan Indonesia di Tokyo sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempermudah perundingan mengenai pemampasan perang tersebut. Dan pada tahun 1958, akhirnya diadakan penandatanganan hubungan diplomatik antara kedua Negara tersebut yaitu Indonesia-Jepang. Sejak itulah kedua Negara telah banyak melakukan penandatanganan persetujuan dan melakukan kerjasama dibidang pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan. (<http://www.tempo.co/hg/nasional/2008/01/20/brk,20080120-115826>)

Disinilah teori multi track diplomacy digunakan untuk melihat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang. Adapun bentuk diplomasi bilateral antara Indonesia-Jepang dalam lima elemen teori multi track diplomacy yaitu government, bussines, funding, private citizen dan research, traning, education.

Di bidang kebudayaan, Indonesia memperkenalkan berbagai macam budaya Indonesia dan juga menjaga citra baik Indonesia. Seperti halnya adanya

festival tari yang diadakan di Jepang yang turut membawa penari Indonesia untuk menunjukkan kebolehannya di Negara Jepang dan Jepang pun sangat menyukai budaya Indonesia karena keberagamannya tersebut. Tak hanya itu saja, akhir-akhir ini banyak budaya Jepang yang masuk di Indonesia seperti halnya model-model pakaian Jepang, style rambut dan harajuku yang disukai oleh kebanyakan anak muda di Indonesia, serta adanya atau banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan kursus bahasa Jepang. Inilah bukti dan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia-Jepang dalam bidang sosial budaya. (<http://www.merdeka.com/gaya/invasi-harajuku-dari-stasiun-ke-seluruh-penjuru-dunia.html>)

Dari berbagai contoh-contoh hubungan diplomasi Indonesia-Jepang, disini dapat kita lihat bahwa hubungan bilateral antar Indonesia dan Jepang itu terjalin sangat baik. Dimana banyak terjadi hubungan diplomasi dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dan Indonesia dalam semua aspek bidang. Sehingga dapat kita katakan bahwa diplomasi Indonesia-Jepang ini terlihat telah berhasil.

## **2.1. PENGARUH DIPLOMASI PUBLIK TERHADAP PEMBUATAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI**

Dewasa ini, isu-isu dalam hubungan internasional meningkat sangat signifikan sehingga memacu aktivitas diplomasi. Hal itu akhirnya menyebabkan, hubungan internasional yang selama ini hanya dipandang sebagai hubungan antar Negara, menjadi luas pandangannya yaitu meliputi hubungan antarmasyarakat internasional.

Peranan aktivitas pemerintah dalam menjalankan misi-misi diplomasi tentu saja tidak akan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu Negara, apabila pemerintahan tersebut masih menggunakan first track diplomacy. Oleh karena itu, peranan public sangat dibutuhkan dalam melengkapi aktivitas yang dilakukan menggunakan first track diplomacy.

Munculnya publik sebagai salah satu kekuatan diplomasi bermula dari asumsi bahwa pemerintah dalam pelaksanaan misi diplomasinya tidak selalu dapat menjawab tantangan yang ada di dalam isu-isu internasional. Hal ini disebabkan sifat kaku yang telah melekat dari pemerintahan itu sendiri. Tentunya peranan public dalam diplomasi ini juga diharapkan dapat membawa upaya diplomasi yang lebih efektif dan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat luas. Selain itu, dengan kehadiran public dalam dunia diplomasi jugad iharapkan dapat memberikan sumbangsih masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah.

Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, setiap Negara dapat menggunakan *hard power* maupun *soft power*. Setelah Perang Dunia II usai, penggunaan *hard power* lebih diminimalisir, sehingga lebih menekankan pada peranan *soft power* dalam penyelesaian sebuah masalah. Dalam *soft power* peranan public tidak dapat dilepaskan, karena turut memberikan andil dalam proses pembuatan sebuah kebijakan. Hal tersebut mendukung bahwa peranan opini public memberikan andil yang cukup berpengaruh dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri sebuah Negara.

Media pelaksanaan dari *soft power* ini antara lainnya terdiri dari peran media internasional, budaya dan pendidikan. Muncul pula pertimbangan bahwa public perlu dilibatkan dalam negosiasi ataupun pembuatan keputusan karena segala bentuk kebijakan luar negeri yang akan diterapkan oleh suatu negara harus mendapatkan dukungan yang kuat dari publik.

Pada akhirnya, apabila opini publik internasional telah dapat dikuasai, maka aktor negara akan mendapatkan dua keuntungan utama. Pertama, proses pembuatan dan perumusan kebijakan politik luar negeri Negara tersebut tidak akan melalui sebuah proses yang sulit (karena telah memahami situasi publik). Kedua, keputusan kebijakan politik luar negeri juga akan dapat diwujudkan secara optimal, karena telah tercapainya faktor pertama dengan baik.

## **2.2. MEDIA SEBAGAI SALAH SATU SALAH SATU ALAT PUBLIK UNTUK MEMPENGARUHI SEBUAH KEBIJAKAN**

Pendekatan yang terpusat media massa dalam diplomasi public masih memegang peran penting. Setiap hari pemerintah harus mengoreksi penyajian-penyajian yang keliru pemberitaannya, sekaligus menyampaikan pesan tentang strategi jangka panjangnya. Kekuatan utama pendekatan media massa adalah pada jangkauan audiensnya dan pada kemampuannya membentuk kesadaran public. Sementara itu, kelemahan media massa terletak pada bahwa pesan yang disampaikan yang tidak selalu berhasil dipahami dalam konteks budaya setempat. Pengirim pesan tahu apa yang dikatakannya, namun penerima pesan tidak selalu paham. Hambatan budaya kerap mendistorsi pesan tersebut.

Komunikasi jejaring, di pihak lain, bisa mengambil keuntungan komunikasi dua arah dan memelihara hubungan kesetaraan untuk mengatasi hambatan budaya itu. Namun bagi pemerintah, tipe desentralisasi dan fleksibilitas yang tinggi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memanfaatkan jejaring telah menimbulkan sebuah paham diplomasi baru yang disebut dengan "diplomasi baru" (new public diplomacy). Jenis diplomasi ini tidak hanya terbatas pada kegiatan mengirim pesan, kampanye promosi atau bahkan pada kontak langsung pemerintah dengan public luar negeri. Diplomasi baru ini juga berkaitan dengan membangun hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat madani di negeri lain dan memfasilitasi jejaring LSM local dengan LSM luar negeri.

Dalam pendekatan ini, kebijakan pemerintah tidak lagi mengontrol, tetapi ditujukan untuk memajukan dan berpartisipasi dalam jejaring lintas Negara. Memang, terlalu banyaknya control pemerintah atau kemunculan pemerintah dalam dimensi itu, bisa menggerus kredibilitas pemerintah itu sendiri. Padahal fungsi jejaring untuk menciptakan kredibilitas itu. Evolusi diplomasi public dari komunikasi satu arah menjadi dialog dua arah mengajak public untuk menjadi partisipan (coreator) dalam menciptakan makna dan komunikasi.

Dunia telah berubah begitu cepat. Baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional telah terjadi pergeseran. Dengan perkembangan ini, Departemen Luar Negeri dan mesin diplomasinya dituntut melakukan penyesuaian sehingga diharapkan mesin diplomasi tersebut mampu menghadapi tantangan-tantangan baru. Mengantisipasi perubahan ini, Departemen luar negeri R.I melakukan restrukturisasi yang diistilahkan dengan Benah diri Deplu. Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Deplu, adalah dengan merubah struktur, dari pendekatan sektoral kearah pendekatan integrative, yaitu dengan tujuan untuk menyeimbangkan pandanganpandangan masalah bilateral, regional dan internasional. Dengan keseimbangan ini diharapkan bahwa Deplu tidak lagi terikat dengan sektor-sektor, tetapi lebih mengarah pada yang sifatnya integratif.

Tiga hal yang menjadi fokus pembenahan Deplu, pertama restrukturisasi organisasi departemen, kedua restrukturisasi perwakilan dan ketiga, Pembenahan profesi Diplomasi. Dari pembenahan ini maka lahir struktur baru diantaranya Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik (IDP). Sebelumnya, direktorat ini tidak ada. Ditengah gelombang globalisasi dimana didalamnya terdapat arus lalu lintas informasi yang begitu intens dan dahsyat, informasi menjadi sesuatu yang kwantitasnya semakin banyak, lalu lintasnya semakin besar dan jangkauannya semakin jauh. Ironinya dengan jumlah informasi yang demikian banyak dan tak terbandung, kadang kala perhatian orang terhadap informasi semakin kecil. Ini namanya terjadi "paradox of Plenty".

Informasi bukanlah sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit. Setiap informasi pasti ada yang menciptakan dan senetral apapun informasi tidak terlepas dari kepentingan pembuatnya. Meski di dunia global yang katanya menjadikan bumi yang kita huni menjadi satu kampung kecil dan tak berbatas, namun faktanya dunia ini masih ada kotak-kotak yang namanya negara. Sehingga loyalitas individu, sosial dan ideologi tetap saja kepada negara. Artinya kita harus melihat bahwa negara sebagai pembuat informasi, penghasil informasi dan pengelola informasi sudah seharusnya membuat informasi yang menimbulkan persepsi positif serta bisa menarik perhatian publik.

Dalam " paradox of plenty " negara atau pemerintah dituntut untuk dapat

membuat berita atau informasi yang mampu menarik perhatian publik, namun masalahnya di era seperti ini dalam suatu negara pembuat berita itu bukan hanya pemerintah saja. Aktor pembuat informasi itu bisa dari LSM, Ormas, Tokoh, DPR, DPD, media dan lain-lain. Sehingga dalam satu hari audience mendengar atau membaca berbagai macam informasi dengan berbagai kepentingan. Padahal dalam konteks negara atau pemerintah akan terdengar aneh jika disatu negara terdapat informasi yang tidak sama atau tidak satu suara, karena akan berimplikasi pada kredibilitas negara atau pemerintah tersebut.

Fungsi dari diplomasi publik diantaranya adalah bagaimana menjembatani informasi yang berkembang di lingkungan domestik dan yang terjadi didunia internasional. Dulu, diplomasi dilihat sebagai ujung tombak kepentingan nasional keluar negeri. Sekarang tidak bisa begitu, diplomasi harus juga mengkomunikasikan apa yang terjadi diluar negeri kedalam negeri. Contohnya seperti kampanye anti korupsi. Saat presiden SBY terpilih sebagai presiden R.I, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pembenahan birokrasi yang bersih dari KKN. Kampanye pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah ternyata sesuai dengan trend dunia dimana berbagai negara juga tengah melakukan kampanye anti korupsi. Sehingga apa yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan perang melawan korupsi tidak bisa dipandang sebagai hanya sekedar ikut-ikutan trend atau karena adanya tekanan dari pihak luar. Hal-hal seperti ini yang harus kita komunikasikan kepada dunia publik.

Begitu juga dengan "Climate Change" atau pemanasan global, para pengusaha kayu inginnya menebang kayu terus, karena untungnya besar tapi perkembangan diluar banyak perubahan iklim yang disebabkan oleh rusaknya hutan dunia, sehingga Alaska semakin runtuh, gunung es mulai mencair, pulau-pulau kecil hilang, semua ini harus kita sampaikan kepada publik dalam negeri, agar hutan tidak terus digunduli.